



Pemkab Tindak Lanjuti Pemeriksaan BPK

MEMPAWAH-RK. Bupati Mempawah Hj, Erlina menghadiri acara penyerahan laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta penyelesaian kerugian Negara/Daerah semester 1 Tahun 2019 di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Kamis (11/7).

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bupati/Walikota se Kalbar, Ketua DPRD se Kalbar dan Kepala Inspektorat.

Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono.

Bupati Mempawah, Erlina menyambut baik pertemuan yang diselenggarakan oleh BPK Provinsi Kalimantan Barat dengan seluruh kepala daerah di Kalimantan Barat.

"Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ini dapat memacu kinerja kita lebih baik ke depannya" ujarnya.

Lebih jauh Erlina mengatakan akan menindaklanjuti segala rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK Provinsi Kalimantan Barat.

"Kita bermitra akan membenahi dan menyelesaikan segala temuan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari BPK Provinsi Kalimantan Barat yang lalu," tegasnya.

Erlina pun berharap permasalahan atau temuan-temuan yang sudah lama tidak dapat terselesaikan agar bisa di selesaikan pada tahun ini.

TANDATANGAN.

Bupati Mempawah Erlina bersama Ketua DPRD menandatangani komitmen bersama usai menghadiri laporan hasil BPK.

HUMAS FOR RK



"Saya berharap temuan pada tahun-tahun yang lalu agar bisa diselesaikan sesegera mungkin agar ke depannya permasalahan ini tidak terus kembali muncul" tukasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono mengatakan, laporan yang diserahkan merupakan hasil atas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta penyelesaian kerugian negara/daerah pada 15 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

"Pemerintah daerah telah melakukan tindak lanjut atas 8.472 rekomendasi (78,63%) dari hasil pemeriksaan BPK, sedangkan atas 65 rekomendasi (0,65%) tidak dapat di tindak lanjut" ujarnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, selain laporan atas pemantauan tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. BPK juga menerbitkan laporan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah. Dari hasil pemantauan masih terdapat kelemahan yaitu kurang aktifnya penanganan kerugian negara.

"Kurang aktifnya penanganan tersebut menyebabkan penanganan menjadi tidak kunjung terselesaikan, sehingga kami menyarankan agar penanganan dilakukan secara lebih aktif baik merevisi aturan dan meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk memonitor kerugian daerah" tegasnya.

Di akhir sambutannya, Joko mengingatkan dan berharap kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah. (sky)